



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

L K I P

**Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah**

TAHUN

2

0

2

1



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALANGKA RAYA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai komitmen serta tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 – 2023, yang dibuat secara periodik dan berisikan informasi mengenai kinerja tahunan organisasi pada tahun berkenaan dalam mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

YOHN B. G. PANGARIBUAN, AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19751219 199402 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2021 ini disusun.

LKIP ini menyajikan capaian indikator kinerja sasaran sebagai hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2021 merupakan pelaksanaan yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan setiap instansi pemerintah diharuskan menyusun laporan kinerja setiap tahunnya. Selain itu LKIP ini juga merupakan kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya secara menyeluruh.

Walaupun demikian masih terdapat indikator yang tidak maksimal pencapaiannya dan ada indikator yang belum maksimal dalam realisasinya. Sehubungan dengan itu maka pada tahun-tahun berikutnya outcome akan terus dipantau dan diupayakan seoptimal mungkin agar indikator penilaian tersebut dapat lebih meningkat. Peningkatan indikator tersebut merupakan target utama karena nilai capaian lebih mendekati tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya. Langkah-langkah demikian dapat meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya pada masa yang akan datang.

Pada Tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dialokasikan anggaran Belanja sebesar Rp. **15.649.427.776** dengan realisasi **Rp. 15.253.322.924** yang dijabarkan ke dalam 2 Program dan 11 Kegiatan. Dalam upaya merealisasikan good governance, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023. Adapun Sasaran Strategis dan indikator Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya yaitu Penurunan Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) dengan Target 550 dan dapat terealisasi dengan baik selama tahun 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap sasaran strategis dan indikator, pencapaian sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya menunjukkan hasil yang memuaskan dengan nilai sebesar 100% dan nilai realisasi anggaran sebesar 97.47%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah	1
1.3. Struktur Organisasi	4
1.4. Sumber Daya Manusia	5
1.5. Gambaran Umum Pelayanan	5
1.6. Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah	6
1.7. Sarana dan Prasarana	6
1.8. Tujuan Penyusunan LKIP	8
1.9. Sistematika Penulisan	8
1.10. Dasar Hukum	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Kerja	11
2.2. Tujuan	12
2.3. Sasaran	12
2.4. Indikator Kinerja Utama	12
2.5. Perjanjian Kinerja	13
2.6. Rencana Kerja Tahunan	13
2.7. Cascading	21
2.8. Rencana Aksi	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	29
3.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	29
3.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	34
3.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	34
3.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun INI dengan Standar Nasional	35
3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	37
3.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
3.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	38
B. Realisasi Anggaran	44
BAB IV PENUTUP	52
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya sebagai Perangkat Daerah melaksanakan ketentuan Pasal 255 dan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya sebagai Perangkat Daerah adalah Urusan Wajib Pelayanan Dasar Trantibumlinmas merupakan tuntutan dan tantangan tapi juga sekaligus peluang untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah Kota Palangka Raya.

1.2. Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya sebagai Perangkat Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengemban tugas:

1. Menegakkan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
3. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Fungsi:

1. Penyusunan program penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya sebagai perangkat daerah adalah urusan wajib Pelayanan Dasar Trantibumlinmas merupakan tuntutan dan tantangan tapi juga sekaligus peluang untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah Kota Palangka Raya.

Pada Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya terdiri dari:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pembinaan Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Kewaspadaan Dini.
 4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Ketertiban Umum.
 5. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi:
 - a. Seksi Penegakan; dan
 - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
 6. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Data dan Informasi; dan
 - b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kepala Satuan
Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup Ketertiban Umum, Ketentraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah secara terpadu bersama-sama Instansi terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretariat
Mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, urusan program perencanaan dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
Membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan masyarakat, kewaspadaan dini, bimbingan dan penyuluhan.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Bidang Penegakan Peraturan Daerah
Melaksanakan penyiapan, menganalisa, pengkajian dan perumusan kebijakan penegakan atas pelanggaran Perundang-undangan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pengawasan dan teknis penyidikan dan penyelidikan, pemeriksaan khusus serta pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang penegakan perundang-undangan.

6. Bidang Perlindungan Masyarakat

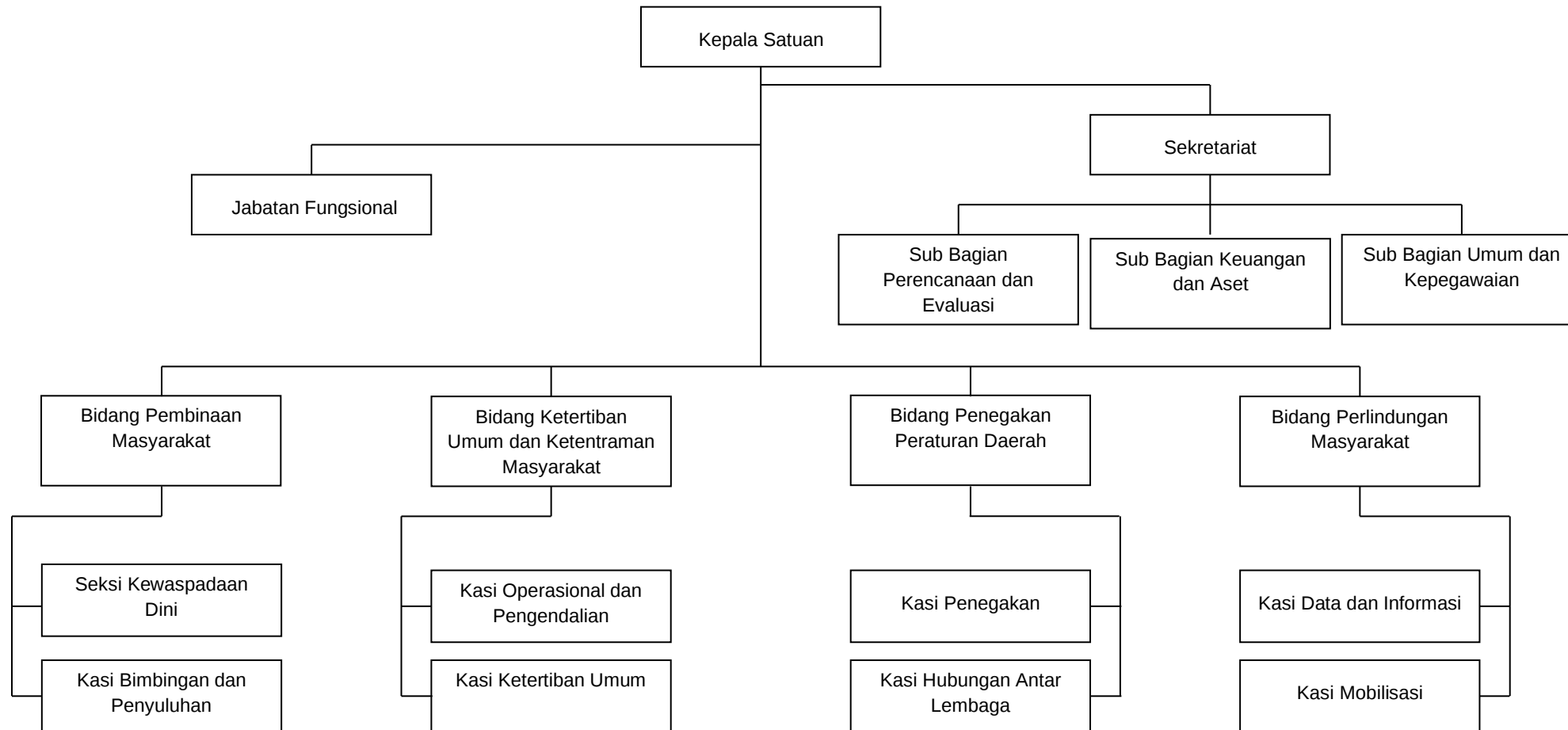
Penyiapan perumusan pelaksanaan pengendalian operasional dan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Mediasi dan Fasilitasi Kesiagaan, Mengantisipasi ketahanan masyarakat.

7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Melaksanakan penindakan Yustisi dan Pro Yustisi, Pengendalian Demo Massa, Pengamanan dan menjadi saksi penyidikan dan saksi persidangan, sosialisasi Perda dan Perkada.

1.3. Struktur Organisasi

GAMBAR I
Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
(Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2019)



1.4. Sumber Daya Manusia

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 memiliki Jumlah PNS sebanyak 72 orang dan Jumlah PTT sebanyak 138 orang dengan total keseluruhan 210 orang, klasifikasi sumber daya manusia dapat dilihat berdasarkan jenjang kepangkatan, tingkat pendidikan formal serta pendidikan perjenjangan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

No	Gol	Jumlah		Pendidikan Umum						Pendidikan Penjejang				
				SD	SMP	SMA	D3	DIV/ S1	S2	Struktural			Teknis/ Fungsional	
		L	P							PIM IV	PIM III	PIM II	Satpol PP	PPNS
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	IV-d													
	IV-c	1						1		1	1	1		1
	IV-b	1						1		1	1			1
	IV-a	4	1					2	3	2	3		1	2
2.	III-d	8	1			2		6		6			1	1
	III-c	3	2					5		2				
	III-b	7				1		6					7	3
	III-a	10	8				1	17					18	1
3.	II-d	11				11							3	
	II-c	8	1			9								
	II-b	1	1			2							2	
	II-a	1				1							1	
4.	I-d													
	I-c													
	I-b													
	I-a													
Jumlah		58	14			26	1	38	3	12	4	1	33	9
5.	PTT	109	29			91	1	46						
Jumlah PNS + PTT		167	43			117	2	84	3	12	4	2	33	9

1.5. Gambaran Umum Pelayanan

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Trantibumlinmas, yaitu berupa:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya ini semoga bermanfaat untuk:

1. Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;

Bahwa pada setiap awal Tahun anggaran, Perangkat Daerah wajib melaksanakan Evaluasi Kinerja pada tahun sebelumnya, hal ini adalah sebagai acuan peningkatan Kinerja pada tahun berjalan yaitu untuk Tahun 2021.

2. Menjadi Penilaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;

Penilaian kinerja Perangkat Daerah merupakan tolak ukur berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan, maka dari itu penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat selalu meningkat pada setiap tahunnya.

3. Penyelenggaraan E-Government dan E-Governance menjadi lebih baik.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemerintah yang baik juga harus didukung dengan kinerja Perangkat Daerah, hal ini menjadi acuan dasar Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan semakin baik pada setiap tahunnya.

1.6. Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibekali pelatihan baik berupa diklat dasar maupun diklat lanjutan selain itu pula perlu adanya diklat PPNS, Manajemen Penyidik, Diklat Intelijen dimana hal ini sangat diperlukan dalam perkembangan kemajuan ekonomi dan sosial di Kota Palangka Raya.

Hal ini juga akan berdampak pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kedepannya, dimana kinerja anggota dapat berjalan dengan lebih baik. Kondisi ketentraman dan ketertiban Kota Palangka Raya saat ini perlu pembenahan dari segala aspek, dan hingga saat ini Satuan Polisi Pamong Praja harus selalu dalam kondisi siap untuk menghadapi segala tantangan.

Peluang Satuan Polisi Pamong Praja sangat besar dalam membantu PAD Kota Palangka Raya, dan hal ini hanya bisa terwujud dengan cara bekerja sama dengan instansi yang memiliki kemampuan dalam menunjang peningkatan PAD. Pada saat ini PAD sangat bisa ditingkatkan dengan memperhatikan baik itu berupa perijinan, pajak dan juga ketertiban dalam hal penempatan lokasi tempat usaha. Satuan Polisi Pamong Praja kedepannya memiliki orientasi yang jelas yaitu Satuan Polisi Pamong Praja untuk PAD, tidak lagi hanya sebatas menegakkan Perda dan Perkada.

1.7. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja juga perlu dibenahi seperti Kendaraan Operasional, perlengkapan individu maupun perlengkapan satuan, agar dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan anggota dapat maksimal, Satuan Polisi Pamong Praja sangat membutuhkan armada yang dalam kondisi baik dan baru, armada adalah penunjang sarana dan prasarana pelaksanaan dalam setiap kegiatan, dan saat ini kondisi armada yang ada bisa dikatakan sudah tidak layak, hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menunjukan kewibawaan Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Palangka Raya dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku.

Pada saat ini Sarana Prasarana yang menunjang mobilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya sangat minim, hal ini disebabkan kondisi kendaraan yang harus dilelang dan perlu adanya peremajaan disebabkan usia kendaraan yang sudah terlalu lama beroperasi.

Dibawah ini ditampilkan tabel sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

TABEL 1.2. SARANA DAN PRASARANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	NAMA	MERK/TYPE	TAHUN	ASUL USUL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Gedung Kantor	Bangunan / Tanah	2018	Pembelian/ Tanah Milik Pemda	1 Unit
2	Bangunan Pos Jaga Permanen	Bangunan / Tanah	2019	Pembelian/ Tanah Milik Pemda	4 Unit
3	Station Wagon	Suzuki Carry / ST150	2005	Pembelian	1 Unit
4	Station Wagon	Toyota Avanza / 1300G	2005	Pembelian	1 Unit
5	Station Wagon	Mitsubishi / Xpander	2020	Pembelian	1 Unit
6	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Suzuki APV	2017	Pembelian	1 Unit
7	Truck + Attachment	Toyota Dyna	2011	Pembelian	1 Unit
8	Truck + Attachment	Toyota Dyna Long 400	2006	Pembelian	1 Unit
9	Sepeda Motor	Honda / Bebek	2007	Pembelian	1 Unit
10	Sepeda Motor	-	2003	Pembelian	1 Unit
11	Sepeda Motor	-	2002	Pembelian	1 Unit
12	Sepeda Motor	Honda	2020	Pembelian	1 Unit
13	Sepeda Motor	Honda	2020	Pembelian	1 Unit
14	Handy Talky	-	2013	Pembelian	5 Unit
15	Handy Talky	Frescom	2016	Pembelian	5 Unit
16	Handy Talky	-	2005	Pembelian	1 Unit
17	Handy Talky	-	2006	Pembelian	2 Unit
18	Handy Talky	Rick Kenwood	2000	Pembelian	1 Unit
19	Handy Talky	HT Kenwood	1999	Pembelian	1 Unit
20	Handy Talky	Radio HF/FM HTICOM IC V80	2013	Pembelian	1 Unit

21	Alat Komunikasi Radio	Motorola/CP1660	2019	Pembelian	10 Unit
22	Tongkat Pemukul	Standar Polri	2014	Pembelian	97 Unit
23	CCTV	-	2020	Pembelian	1 Paket
24	Station Wagon	Suzuki Ertiga	2021	Pembelian	1 Unit
25	Station Wagon	Wuling Confero	2021	Pembelian	1 Unit
26	Sepeda Motor	Honda / CB150R	2021	Pembelian	1 Unit
27	Sepeda Motor	Honda / CB150R	2021	Pembelian	1 Unit
28	Bangunan Menara Telekomunikasi	Receiver HT	2021	Pembelian	1 Paket
29	Gedung Pos Jaga Permanen	Bangunan / Tanah	2021	Pembangunan	8 Unit
TOTAL					153 Unit

1.8. Tujuan Penyusunan LKIP

Tujuan Penyusunan LKIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 untuk mendorong penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seluruh instansi pemerintah telah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja di setiap tahunnya, hal itu merupakan salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.

Cakupan/ruang lingkup Implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah:

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan;
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan; dan
5. Capaian Kinerja.

1.9. Sistematika Penulisan

Tata urutan atau sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya disusun dengan mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Tata urutan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini dijelaskan mengenai rincian realisasi anggaran atas capaian kinerja organisasi ataupun serapan anggaran yang terjadi selama tahun 2021 dan digambarkan secara umum mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya selama Tahun 2021.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

1.10. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 Tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya; dan
19. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Kerja

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2021 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis 2018-2023. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan target indikator program dan kegiatan, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dilaksanakan secara periodik. Maka disajikan Pengukuran Target Capaian Kinerja untuk dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya selama Tahun 2021.

Pada Tahun Anggaran 2021 sebagai tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD Kota Palangka Raya dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya periode 2018– 2023, melaksanakan 1 (satu) urusan, 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

B. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota;
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

Di bawah ini ditampilkan tabel Program, Kegiatan dan Anggaran pada Tahun 2021.

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		13.522.626.400
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.008.938
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.131.547.398
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	464.509.458
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.032.925.251
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	672.377.250
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.779.258.105
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.000.000
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		2.126.801.376
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.437.424.563
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota	666.165.813
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	23.211.000

2.2. Tujuan

Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat disesuaikan dengan keadaan masyarakat/lingkungan dan ketersediaan sarana dan prasarana

2.3. Sasaran

1. Tersedianya arah kebijakan dan strategis pembangunan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Tersedianya pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021; dan
3. Tersedianya bahan informasi dan bahan masukan bagi instansi/lembaga pemerintah maupun non pemerintah serta masyarakat yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung.

2.4. Indikator Kinerja Utama

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 pasal 3 dan pasal 4 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2021-2023 sehingga perlu

ditetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Nomor 05/Kep/Pol.PP/I/2021.

Adapun Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2021 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2021

No.	Indikator	Kondisi Awal 2019	Target 2020	Formula Pengukuran
1.	Pelanggaran K3	593	550	$AP = (\text{Jumlah Pelanggaran K3 Tahun N}) - (\text{Jumlah Pelanggaran K3 Tahun N-1})$

2.5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang berada di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen antara pemberi amanah dengan penerima amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, Rencana Kerja (Renja), Cascading, Rencana Aksi dan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Pelanggaran K3	550

2.6. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) diatur dalam Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. RKT merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018-2023.

RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2021 merupakan Rencana tahun ketiga dari RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dan sebagai penjabaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2023. RKT menjabarkan

Sasaran strategi, indikator kinerja serta target kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen dari yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dilakukan seiring dengan telah ditetapkan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, serta Komitmen Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 adalah target Setting dari capaian indikator kinerja.

Tabel 2.4. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2021	Program	Kegiatan - Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan - Sub kegiatan	Target 2021	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	107,999,938
		Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklajuti	100%			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi, Renstra dan Renja Perangkat Daerah, RKA dan DPA Perangkat Daerah	12 Dokumen	72,000,000
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2 Laporan	24,000,000
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	11,999,938
					2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	6,880,142,895
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar	12 Bulan	6,824,143,144
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah akuntansi dan pelaporan keuangan	12 Laporan	15,000,000
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan	1 Laporan	7,999,938
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan	12 Laporan	17,999,813

						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Semester	2 Laporan	15,000,000
					3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	50,000,000
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang yang diasuransikan	26 Unit	50,000,000
					4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	533,159,813
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang dibeli	1 Unit	20,000,000
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	207 Stel	277,300,000
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	6 Orang	179,999,813
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 Orang	27,010,000
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	10 Orang	28,850,000
					5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,022,996,189
						Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang dibeli	15 Jenis/Buah	19,999,000

						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah ATK yang di beli	60 Jenis/Buah	750,000,500
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	4 Jenis/buah	30,000,000
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibeli	9 Jenis/ eksemplar	89,999,938
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang di beli	12 Jenis	48,000,000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat, koordinasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan di luar daerah	18 Kali	64,996,938
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	36 laporan	19,999,813
					6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	606,000,000
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang di beli	3 Unit	501,000,000
						Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis Meubeleur yang di beli	19 Unit	30,000,000
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang di beli	8 Unit	75,000,000
					7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	4,726,170,390
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Distribusi Surat Menyurat	5322 lembar	25,000,000

						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik setiap Bulan yang terbayar	36 bulan/ rekening	128,999,890
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	30,000,000
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan dan Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar	12 bulan	4,542,170,500
					8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	225,000,000
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diservis dan berizin	26 unit	20,000,000
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	162 unit	10,000,000
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	64 unit	20,000,000
						Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara	1 unit/m ²	175,000,000
2	Menurunnya Pelanggaran K3	Pelanggaran K3	550	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	1,306,507,063

						Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah laporan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	228 laporan	435,227,500
						Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada	90 Laporan	89,999,688
						Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan ketentramanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	12 Laporan	18,000,000
						Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	110 Laporan	448,849,875
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Anggota yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas	100 orang	35,460,000
						Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan ketentramanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	12 Laporan	53,970,000

						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah unit pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	60 Unit	225,000,000
					2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Wali Kota	150 Orang	75,499,688
						Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	150 Orang	33,499,875
						Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	24 Laporan	30,000,000
						Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota	24 Laporan	11,999,813
					3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	1 Orang	7,875,000
						Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS	1 Orang	7,875,000
						TOTAL			15,541,350,976

2.7. Cascading

Cascading Tahun 2021 memuat Visi, Misi, Indikator Pemko, Formulasi/ Penjelasan, Target Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran, Alasan pemilihan Indikator, dan Indikator Sasaran Perangkat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 1 Sekretariat dan 4 Bidang Teknis. Bidang Teknis tersebut melaksanakan 1 Target Indikator Utama yang telah disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya yang tetap mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kota Palangka Raya.

Dibawah ini adalah Tabel Cascading dengan alasan pemilihan indikator dan formulasi penjelasannya:

Tabel 2.5. Cascading Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

Visi	Misi	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Alasan pemilihan Indikator	Formulasi/ Penjelasan	Indikator Sasaran	
										Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target 2021
Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun dan Sejahtera Untuk Semua	Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat Menjadi Smart Society (Masyarakat Cerdas)	Masih adanya masyarakat yang tidak mentaati Perda yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya	Meningkatkan kerukunan dan ketertiban di kalangan masyarakat	Angka Kriminalitas	5.75	Penurunan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Berdasarkan yang Tercantum dalam Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota	(Jumlah Pelanggaran K3 Tahun N) - (Jumlah Pelanggaran K3 Tahun N-1)	593	550

2.8. Rencana Aksi

Rencana Aksi Satuan Polisi Pamong Praja memiliki target yang diharapkan pada akhir tahun anggaran target tersebut dapat terpenuhi yang mana Rincian Rencana Aksi dapat dilihat pada lampiran di bawah ini :

Tabel 2.6. Rencana Aksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Program	Anggaran	Kegiatan - Sub Kegiatan		Anggaran	Output Kegiatan	Target 2021	Target Realisasi (%)			
												I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	14,151,469,225	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107,999,938	Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	20	40	85	100
		Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti	Persentase	100%				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72,000,000	Jumlah Dokumen Evaluasi, Renstra dan Renja Perangkat Daerah, RKA dan DPA Perangkat Daerah	12 Dokumen	20	40	85	100
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24,000,000	Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2 Laporan	20	40	85	100
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,999,938	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	20	40	85	100
							2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,880,142,895	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	20	40	85	100

								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,824,143,144	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar	12 Bulan	20	40	85	100
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15,000,000	Jumlah akuntansi dan pelaporan keuangan	12 Laporan	20	40	85	100
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,999,938	Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan	1 Laporan	20	40	85	100
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	17,999,813	Jumlah laporan Keuangan	12 Laporan	20	40	85	100
								Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15,000,000	Jumlah Laporan Semester	2 Laporan	20	40	85	100
							3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50,000,000	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	20	40	85	100
								Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50,000,000	Jumlah barang yang diasuransikan	26 Unit	20	40	85	100
							4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	533,159,813	Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	20	40	85	100
								Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20,000,000	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang dibeli	1 Unit	20	40	85	100
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	277,300,000	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	207 Stell	20	40	85	100
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	179,999,813	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	6 Orang	20	40	85	100

								Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27,010,000	Jumlah pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 Orang	20	40	85	100
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28,850,000	Jumlah pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	10 Orang	20	40	85	100
							5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,022,996,189	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	20	40	85	100
								Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	19,999,000	Jumlah komponen listrik yang terbeli	15 Jenis/ Buah	20	40	85	100
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	750,000,500	Jenis dan jumlah ATK yang di beli	60 Jenis/ Buah	20	40	85	100
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,000,000	Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	4 Jenis/ buah	20	40	85	100
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	89,999,938	Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibeli	9 Jenis/ eksemplar	20	40	85	100
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	48,000,000	Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang di beli	12 Jenis	20	40	85	100
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64,996,938	Jumlah rapat, koordinasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan di luar daerah	18 Kali	20	40	85	100
								Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19,999,813	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	36 laporan	20	40	85	100
							6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	606,000,000	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	20	40	85	100

								Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	501,000,000	Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang di beli	3 Unit	20	40	85	100
								Pengadaan Mebel	30,000,000	Jumlah dan jenis Meubeleur yang di beli	19 Unit	20	40	85	100
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75,000,000	Jumlah peralatan dan mesin yang di beli	8 Unit	20	40	85	100
							7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,726,170,390	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	20	40	85	100
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25,000,000	Jumlah Distribusi Surat Menyurat	5322 lembar	20	40	85	100
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128,999,890	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik setiap Bulan yang terbayar	36 bulan/ rekening	20	40	85	100
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	20	40	85	100
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,542,170,500	Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan dan Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar	12 bulan	20	40	85	100
							8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225,000,000	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	20	40	85	100
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20,000,000	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diservis dan berizin	26 unit	20	40	85	100
								Pemeliharaan Mebel	10,000,000	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	162 unit	20	40	85	100

								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000	Jumlah dan jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	64 unit	20	40	85	100
								Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	175,000,000	Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara	1 unit/m²	20	40	85	100
2	Menurunnya Pelanggaran K3	Pelanggaran K3	Nilai	550	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,389,881,751	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,306,507,063	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	20	40	85	100
								Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	435,227,500	Jumlah laporan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	228 laporan	20	40	85	100
								Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	89,999,688	Jumlah laporan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada	90 Laporan	20	40	85	100
								Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	18,000,000	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	12 Laporan	20	40	85	100

							Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	448,849,875	Jumlah Laporan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	110 Laporan	20	40	85	100
							Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	35,460,000	Jumlah Anggota yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas	100 orang	20	40	85	100
							Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	53,970,000	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	12 Laporan	20	40	85	100
							Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	225,000,000	Jumlah unit pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	60 Unit	20	40	85	100
						2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	75,499,688	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Wali Kota	12 bulan	20	40	85	100
							Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	33,499,875	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	150 Orang	20	40	85	100
							Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30,000,000	Jumlah laporan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	24 Laporan	20	40	85	100

								Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	11,999,813	Jumlah laporan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota	24 Laporan	20	40	85	100
							3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	7,875,000	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	1 Orang	20	40	85	100
								Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	7,875,000	Jumlah PPNS	1 Orang	20	40	85	100
						15,541,350,976		TOTAL	15,541,350,976			20	40	85	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya mengalami tingkat pekerjaan yang sangat tinggi dikarenakan masih terjadinya pandemi COVID-19, hal ini mempengaruhi pola kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang dituntut untuk lebih ekstra meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum. Terutama untuk penanganan pandemi yang pada awal kemunculannya menimbulkan rasa khawatir pada masyarakat Kota Palangka Raya.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat terlihat dari jumlah anggota yang turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan Pengamanan, Sosialisasi, Patroli dan Penertiban disemua bidang, dengan cara mengerahkan semua anggota di beberapa titik strategis serta melakukan sosialisasi dan patroli untuk dilakukan pengawasan dan pemberian informasi terkait pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 bersama instansi terkait seperti BPBD, Dinas Kesehatan, TNI dan Polri serta sukarelawan.

Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya juga terus secara aktif melakukan Penegakan Perda maupun Perkada dengan melakukan pengecekan perizinan kesejumlah lokasi usaha.

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2021 ini berpengaruh pada penilaian di beberapa Indikator Kinerja Utama. Pada BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini akan dijelaskan beberapa poin penting terkait tingkat keberhasilan maupun kegagalan pencapaian, dan diharapkan pada tahun selanjutnya dapat menjadi acuan dasar untuk peningkatan Indikator Kinerja Utama.

A. Capaian Kinerja Organisasi

3.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 mengalami peningkatan dari sisi pelaksanaan, hal ini dikarenakan terdapat dua prioritas pelaksanaan kegiatan yang terjadi, pertama adalah status siaga pandemi COVID-19 yang menuntut anggota untuk lebih proaktif dan berfokus kepada menjaga ketenteraman dan ketertiban umum dalam penanganan pandemi COVID-19.

Dalam pelaksanaan penanganan COVID-19, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan sosialisasi, pengamanan tempat-tempat keramaian, patroli di kecamatan-kecamatan, melakukan penertiban pada pelaku usaha yang membuka dagangan pada saat jam malam, hal ini berlangsung selama Tahun 2021.

Prioritas kedua adalah Penegakan Perda maupun Perkada kepada sejumlah pelaku usaha dengan sistem jemput bola dalam pemeriksaan perizinan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dibawah ini akan disajikan tabel indikator, realisasi dan capaian Satuan Polisi Pamong Praja dan ditampilkan pula rekapitulasi jumlah pelanggaran melalui pengaduan masyarakat, penertiban perijinan serta melalui patroli ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada Tahun 2021 yang disebut dengan Pelanggaran K3.

Tabel 3.1. Indikator, Realisasi dan Capaian Tahun 2021

No.	Indikator	Target Indikator	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Pelanggaran K3	550	550	100%
Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama				100%

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya berdasarkan target Indikator Kinerja Utama dapat dihitung berdasarkan penjelasan sebagai berikut:

Target Indikator Pelanggaran K3;

Penanganan Pelanggaran K3 dilakukan dengan cara melakukan penertiban dan pengawasan kepada pelaku usaha yang belum atau tidak memiliki ijin serta sejumlah Pelanggar Protokol Kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan patroli dan pengecekan langsung ke masyarakat serta pelaku usaha di lokasi kegiatan dalam wilayah Kota Palangka Raya.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Jumlah Pelanggaran K3 yaitu 550, dengan perbandingan capaian antara target dan realisasi senilai **100%**. hal ini didasari dengan jumlah pengaduan dan pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani yang mana semua pelanggar diberikan himbauan agar dapat menyelesaikan kekurangan terhadap perijinan-perijinan yang perlu dituntaskan maupun diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Perda maupun Perkada.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur Pelanggaran K3 adalah:

1. Penertiban Perijinan; dan
2. Peningkatan Kerjasama dalam Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Perda.

Tujuan pengawasan terhadap Penertiban Perijinan adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap kelengkapan administrasi perijinan pelaku usaha di Wilayah Kota Palangka Raya;
2. Memberikan edukasi bagi pelaku usaha agar mengetahui dan mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di Wilayah Kota Palangka Raya; dan
3. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha untuk mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya.

Solusi dalam Penegakan Peraturan daerah ini untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam mencapai keberhasilan adalah dengan cara:

1. Kegiatan Pengawasan dan Pengecekan untuk Penertiban Perijinan di Wilayah Kota Palangka Raya perlu dilakukan lebih intensif lagi dalam usaha pencapaian peningkatan PAD Kota Palangka Raya.
2. Melalui Kegiatan Pengawasan dan Pengecekan untuk Penertiban Perijinan di Wilayah Kota Palangka Raya diharapkan dapat memberikan edukasi,

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha untuk mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di wilayah Kota Palangka Raya.

Capaian Kinerja pada indikator ini sudah sesuai dengan target yang diharapkan yaitu **sangat berhasil** (data dukung tersedia pada bagian lampiran).

DOKUMENTASI KEGIATAN

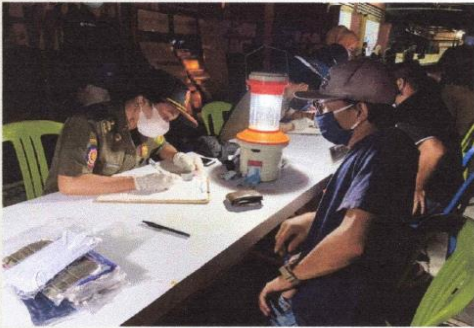


Pendampingan Bersama Petugas Kesehatan dalam Penanganan ODGJ



Patroli Siaga Ketertiban Umum di wilayah Kota Palangka raya

Pemeriksaan Perizinan Pelaku Usaha di wilayah Kota Palangka raya



Melaksanakan Tindakan Non Yustisi kepada Pelanggar Perda/Perkada

Melaksanakan Penyegelan Terhadap Tempat Usaha Tidak Berizin dan Melakukan Pelanggaran Perda/Perkada



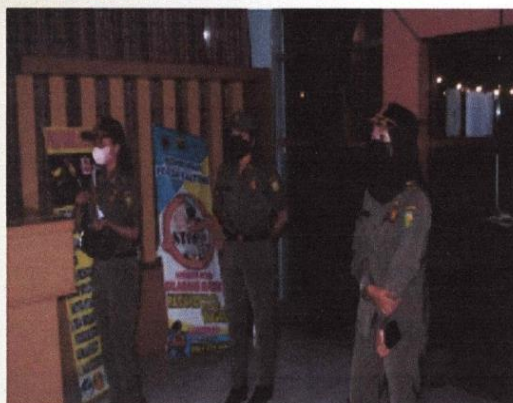
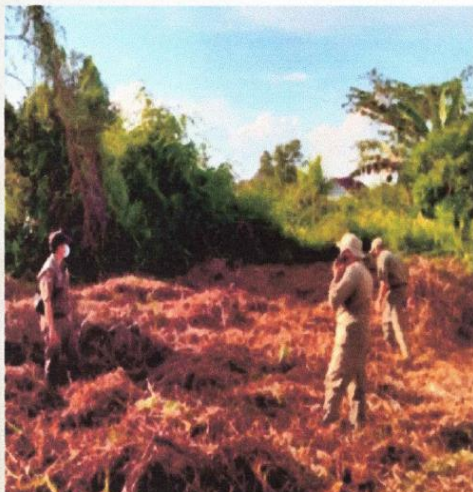
Pelaksanaan Penanganan Bencana Banjir

Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Perda/Perkada

DOKUMENTASI KEGIATAN



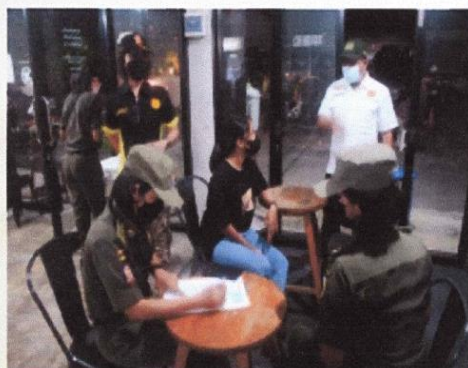
Patroli Pemantauan lokasi yang rawan akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA)



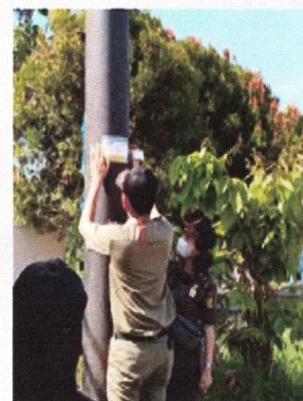
Pengawasan Tempat Hiburan Malam



Pemeriksaan Perizinan Penjualan Minuman Beralkhol



Pemeriksaan Perizinan Cafe dan Rumah Makan



Pendataan Tiang Reklame yang Berizin dan Tidak Berizin

Kegiatan dan Bidang yang mendukung Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) sesuai dengan **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban** adalah sebagai berikut:

1. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - a. Piket Pos Objek Vital;
 - b. Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - c. Pengawasan dan Pengamanan Pejabat;
 - d. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
 - e. Terpenuhinya pembinaan personil;
 - f. Penertiban Perijinan;
 - g. Peningkatan Kerjasama dalam Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Perda;
2. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - a. Pelayanan dan Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
 - c. Deteksi Dini dan Kesiagaan Lingkungan Masyarakat;
3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah
 - a. Penertiban Perijinan;
 - b. Peningkatan Kerjasama dalam Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Perda;
4. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - a. Penanganan Bencana Kebakaran dan Banjir;
 - b. Pendampingan Tenaga Kesehatan dalam rangka Vaksinasi dan pelayanan Kesehatan;
 - c. Pelaksanaan PPKM Mikro.

Bidang teknis yang menangani Indikator ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi dan kegiatan yang telah ditentukan dimasing-masing bidang, seperti Bidang Pembinaan Masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan patroli rutin serta pengawasan, Bidang Penegakan Peraturan Daerah melaksanakan Penertiban Perijinan serta Bidang Perlindungan Masyarakat menangani kebutuhan Satlinmas.

Pada Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja berfokus pada pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 yang bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, BPBP, Dishub, TNI, Polri serta sukarelawan.

Capaian pada indikator Persentase penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) ini adalah **100%** berdasarkan jumlah pelanggar yang berjumlah 550 orang dengan jumlah penyelesaian adalah 550 orang. Namun demikian Satuan Polisi Pamong Praja selaku pelaksana indikator ini masih merasa belum maksimal dan belum puas, hal ini dikarenakan dari beberapa kegiatan yang

dilaksanakan terdapat beberapa kegiatan yang harus tidak dilaksanakan karena tidak cukupnya anggaran yang mengakibatkan kegiatan tersebut anggarannya menjadi Rp. 0,-.

Secara teknis hal ini sangat berpengaruh pada rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, walaupun tetap berjalan namun menjadi tidak maksimal terhadap realisasi yang ingin dicapai. Karena diharapkan target yang ingin dicapai adalah semua aspek pada masyarakat yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah.

3.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja utama, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya juga mengacu pada hasil LKIP pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk bahan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilaksanakan.

Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 pada saat ini memasuki tahun ketiga dengan arah kebijakan optimalisasi pembangunan infrastruktur di Kota Palangka Raya untuk mewujudkan lingkungan cerdas.

Maka berdasarkan hal tersebut Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja juga ikut andil dalam melaksanakan arah kebijakan tersebut dengan cara membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah utamanya di bidang perijinan bangunan, dan perijinan-perijinan yang termasuk di dalamnya serta peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum lainnya.

Dibawah ini akan ditampilkan tabel kondisi realisasi dan capaian pelaksanaan tiga tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja :

Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Pelaksanaan tiga tahun

No.	Indikator	Realisai Tahun (awal) 2019	Target 2021	Realisasi Tahun 2020	Capaian 2020/ 2019	Realisasi Tahun 2021	Capaian 2021/ 2020	Capaian Indikator
1.	Pelanggaran K3	593	550	227	-366	550	323	Angka Pelanggran = (Jumlah Pelanggaran K3 Tahun N) – (Jumlah Pelanggaran K3 Tahun N-1)

3.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

RPJMD Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 mengalami perubahan hal ini dikarenakan untuk penyesuaian terhadap Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kendati demikian masih mengacu pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

Target Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya yang terdapat pada Misi Kepala Daerah yaitu **Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas)** adalah Angka Kriminalitas Yang Tertangani.

Target Angka Kriminalitas yang Tertangani adalah **5,75** pada tahun 2021 sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan formula (Jumlah Kriminalitas Tahun N – Jumlah Kriminalitas Tahun N-1). Berdasarkan jumlah angka kriminalitas yang ada di Kota Palangka Raya pada Tahun 2021 yang terdapat pada Polresta Palangka Raya adalah 505 kasus atau **17,23%** dari jumlah penduduk Kota Palangka Raya yaitu **193.023** jiwa (Data Disdukcapil Kota Palangka Raya) dengan kasus tertangani **328** atau **65%** dengan demikian kasus yang tertangani pada Tahun 2021 adalah **11,19%** dari jumlah penduduk Kota Palangka Raya. Dan pada Tahun 2020 kasus yang tertangani adalah **6,24%** maka kasus yang tertangani sesuai dengan Target Angka Kriminalitas pada Tahun 2021 adalah **4,95**.

3.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta turunannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada BAB II tentang Penerapan dan Pencapaian SPM, Satuan Polisi Pamong Praja berada di Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dengan indikator pencapaiannya adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada.

Di bawah ini ditampilkan tabel bidang urusan SPM serta program/kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan:

Tabel 3.6. Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal

Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Realisasi Tahun 2021	Capaian
		Target		
1	2	3	4	5
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Persentase penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan	100%	100%	100%

Satuan Polisi Pamong Praja masih menghadapi kendala yang sama seperti pada tahun sebelumnya, potensi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) adalah berupa seberapa besar efektifitas dalam penyelenggaraan dalam mencapai sasaran target indikator kinerja.

Adapun sumber daya pada Tahun 2021 yaitu terkait dua hal dalam mencapai target sasaran strategis adalah Sumber Daya Manusia (anggota Satpol PP) dan Anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia, yaitu jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (72 orang PNS) dibandingkan wilayah tugas dan kompleksitas ketenteraman dan ketertiban umum, dalam kajian Rasio Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja dianggap belum memadai. Pengaturan dan Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan hasil Kajian dan analisa Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya idealnya sejumlah 251 – 350 personil. Guna untuk memaksimalkan pendayagunaan Sumberdaya Manusia maka Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan perpanjangan Kontrak Pegawai Tidak Tetap Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 138 personil, dan perlu penambahan jumlah anggota dan penambahan anggaran untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja masih perlu ditambahkan jumlah PNS, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pada BAB IV tentang Sumber Daya Manusia Pasal 15 Ayat (1) bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Persyaratan.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2021 mengalami 2 kali perubahan anggaran, hal ini disebabkan adanya rasionalisasi dalam menghadapi pandemi Virus COVID-19 serta perubahan anggaran murni, dengan kondisi anggaran pada akhir tahun anggaran sebesar Rp.15.649.4272.776,- digunakan untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun anggaran belanja langsung digunakan untuk mengakomodir 2 Program dan 11 kegiatan guna mencapai target pada indikator sasaran strategis. Untuk tingkat efisiensi dalam penggunaan Sumber Daya Manusia Satpol PP dirasa efektif namun belum efisien dikarenakan masih belum tercukupinya kebutuhan minimal anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai sasaran strategis sehingga belum maksimal dari segi peningkatan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama terutama pada jumlah Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan capaian realisasi fisik dirasa sangat efisien, dengan kondisi penganggaran yang tersedia dan perlu dibenahi adalah dari segi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan penertiban, pengawasan, patroli serta pendataan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada di Wilayah Kota Palangka Raya.

Pada indikator Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, untuk meningkatkan kinerja Satpol PP dibutuhkan penambahan ASN Anggota Polisi Pamong Praja yang memadai, walaupun di tahun 2021 Satuan Polisi pamong Praja Kota Palangka Raya mendapat tambahan 15 CPNS akan tetapi masih dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan SDM. Sehingga untuk mengatasi kebutuhan anggota Satpol PP dilakukan melalui perpanjangan kontrak pegawai tidak tetap Polisi Pamong Praja yang ada sementara ini sebanyak 138 orang. Dan hal tersebut masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan baik melalui Renstra maupun RPJMD Perubahan, yang selayaknya mencapai 251 hingga 350 orang.

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Secara umum, capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya sudah termasuk dalam katagori berhasil karena Persentasi Pelanggaran K3 yang tertangani di Kota Palangka Raya mengalami pencapaian 100% berdasarkan RPJMD yang mana pada tahun 2021 angka Pelanggaran K3 yang tertangani adalah 550.

Dalam hal Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya juga mengalami peningkatan dengan adanya penambahan SDM sebagai salah satu pendorong dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Penanganan Pelanggaran K3 walaupun dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

Adapun alternatif serta solusi yang dilakukan dalam pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya pada Tahun 2021 adalah dengan terus memberikan semangat kepada anggota serta menanamkan nilai Nasionalisme dan Integritas agar dapat bekerja secara profesional dalam Penanganan Pelanggaran K3 demi Kota Cantik Palangka Raya.

3.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah ukuran keberhasilan penggunaan sumber daya dalam suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya mengacu kepada Permendagri Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja dan RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya yang mana Jumlah Ideal Anggota adalah 251 sampai dengan 350 orang dalam Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk Tahun 2021 jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya adalah 210 orang yang berarti dapat dianalisis bahwa masih berada di bawah jumlah ideal, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya harus benar-benar memaksimalkan SDM dalam pelaksanaan kegiatan untuk Penangan Pelanggaran K3 yang disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

3.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berikut sasaran strategis, indikator kinerja dan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka raya yang disajikan berdasarkan tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7. Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program/Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2021**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan - Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan - Sub kegiatan	Target 2021	Capaian	%	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi, Renstra dan Renja Perangkat Daerah, RKA dan DPA Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar	12 Bulan	12 Bulan	100%

				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah akuntansi dan pelaporan keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100%
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Semester	2 Laporan	2 Laporan	100%
			3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang yang diasuransikan	26 Unit	26 Unit	100%
			4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang dibeli	1 Unit	1 Unit	100%
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	207 Stell	207 Stell	100%
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	6 Orang	6 Orang	100%
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 Orang	-	-

					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	10 Orang	-	-
				5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%
					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang terbeli	15 Jenis/Buah	15 Jenis/Buah	100%
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah ATK yang di beli	60 Jenis/Buah	60 Jenis/Buah	100%
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	4 Jenis/buah	4 Jenis/buah	100%
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibeli	9 Jenis/eksemplar	9 Jenis/ eksemplar	100%
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang di beli	12 Jenis	12 Jenis	100%
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat, koordinasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan di luar daerah	18 Kali	18 Kali	100%
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	36 laporan	36 laporan	100%
				6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang di beli	3 Unit	3 Unit	100%

					Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis Meubeleur yang di beli	19 Unit	-	-
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang di beli	8 Unit	8 Unit	100%
				7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100%
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Distribusi Surat Menyurat	5322 lembar	5322 lembar	100%
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik setiap Bulan yang terbayar	36 bulan/ rekening	36 bulan/ rekening	100%
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	100%
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan dan Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar	12 bulan	12 bulan	100%
				8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diservis dan berizin	26 unit	26 unit	100%
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	162 unit	162 unit	100%
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	64 unit	64 unit	100%

					Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara	1 unit/m ²	1 unit/m ²	100%
2	Menurunnya Pelanggaran K3	Pelanggaran K3	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	12 Bulan	100%
					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah laporan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	228 laporan	228 laporan	100%
					Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada	90 Laporan	90 Laporan	100%
					Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan ketentramanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	12 Laporan	12 Laporan	100%
					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	110 Laporan	110 Laporan	100%
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi	Jumlah Anggota yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas	100 orang	-	-

					Manusia				
					Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan ketentramanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	12 Laporan	-	-
					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah unit pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	60 Unit	60 Unit	100%
				2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Wali Kota	150 Orang	150 Orang	100%
					Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	150 Orang	150 Orang	100%
					Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	24 Laporan	24 Laporan	100%
					Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota	24 Laporan	24 Laporan	100%
				3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	1 Orang	1 Orang	100%
					Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS	1 Orang	1 Orang	100%

Berdasarkan Tabel diatas menunjukan bahwa program/kegiatan dapat dilaksanakan dan ada 5 program yang mengalami refocusing dan tidak memiliki anggaran sehingga capaian tidak bisa dilakukan penilaian walaupun kegiatan tetap dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan sejumlah SOPD lain.

B. Realisasi Anggaran

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Belanja yang terdiri dari 2 Program, 11 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan yang total pagunya senilai **Rp. 15.649.427.776,-** yang rinciannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.8. Anggaran Murni, Anggaran Refocusing dan
Anggaran Perubahan Tahun 2021**

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Refocusing	Anggaran Perubahan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.999.938	123.499.938	157.008.938
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.000.000	87.500.000	103.250.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.000.000	24.000.000	12.240.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.999.938	11.999.938	41.518.938
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.880.142.895	6.448.269.123	6.131.547.398
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.824.143.144	6.392.269.372	6.083.847.647
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.000.000	15.000.000	12.500.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.999.938	7.999.938	7.999.938
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	17.999.813	17.999.813	14.999.813
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15.000.000	15.000.000	12.200.000
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	533.159.813	593.344.063	464.509.458
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20.000.000	23.156.250	23.156.250
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	277.300.000	317.060.000	317.060.000
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	179.999.813	197.267.813	124.293.208
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27.010.000	27.010.000	0
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.850.000	28.850.000	0
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.022.996.189	1.035.005.651	1.032.925.251
1	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	19.999.000	19.999.000	19.999.000

2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	750.000.500	748.006.900	750.330.500
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	44.000.000	34.000.000
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	89.999.938	89.999.938	60.495.938
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.000.000	48.000.000	43.100.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.996.938	65.000.000	105.000.000
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19.999.813	19.999.813	19.999.813
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	606.000.000	662.522.750	672.377.250
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	501.000.000	532.029.000	525.571.000
2	Pengadaan Mebel	30.000.000	30.000.000	0
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000	100.493.750	146.806.250
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.726.170.390	4.784.318.500	4.779.258.105
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	10.000.000	10.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.999.890	175.011.500	163.602.355
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	30.000.000	30.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.542.170.500	4.569.307.000	4.575.655.750
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.000.000	225.000.000	235.000.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	20.000.000	20.000.000
4	Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	175.000.000	175.000.000	185.000.000
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.306.507.063	1.306.507.063	1.437.424.563
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	435.227.500	435.227.500	651.410.000
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	89.999.688	89.999.688	44.312.188

	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	18.000.000	18.000.000	35.261.850
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	448.849.875	448.849.875	528.053.025
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	35.460.000	35.460.000	0
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	53.970.000	53.970.000	0
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	225.000.000	225.000.000	178.387.500
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	75.499.688	77.749.688	666.165.813
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	33.499.875	35.749.875	110.608.500
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30.000.000	30.000.000	106.847.500
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	11.999.813	11.999.813	448.709.813
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	7.875.000	23.211.000	23.211.000
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	7.875.000	23.211.000	23.211.000
	TOTAL	15.541.350.976	15.329.427.776	15.649.427.776

Berdasar data analisa tersebut dapat terlihat bahwa terdapat penambahan anggaran senilai **Rp. 108.076.800** Yang sebelumnya bernilai **Rp. 15.541.350.976,-** menjadi **Rp. 15.649.427.776,-**

Terdapat beberapa kegiatan yang nilai pagunya Rp. 0,- (nol) atau tidak memiliki anggaran hal ini disebabkan adanya rasionalisasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan yang memiliki pagu dan dilakukan rasionalisasi hingga tidak dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9. Kegiatan yang di Rasionalisasi

Kegiatan	Anggaran	Anggaran
	(Rp)	(Rp)
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27.010.000	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.850.000	0
Pengadaan Mebel	30.000.000	0

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	35.460.000	0
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	53.970.000	0
Total	175.290.000	0

Kegiatan yang tidak memiliki anggaran berpengaruh terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, tapi tetap harus dilaksanakan mengingat hal ini menunjang dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya sehingga dilakukan sejumlah kebijakan dengan tetap menjalankan sejumlah kegiatan walaupun tanpa anggaran serta melakukan koordinasi dengan SOPD lain dalam hal hibah untuk memenuhi kebutuhan meubeler di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

Realisasi Keuangan Belanja Langsung Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya pada Tahun 2021 mencapai 97,47% dan Realisasi Fisik 100%. Hal ini menjadi catatan baik bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, dikarenakan pada tahun sebelumnya capaian realisasi keuangan masih hanya mencapai 96,48% yang berarti pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Analisa Program atau Kegiatan yang menjadi penunjang berhasil atau tidaknya sasaran indikator Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya berdasarkan tabel dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 3.10.Realisasi keuangan triwulan sampai dengan Desember 2021

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi keuangan pada (Bulan)			
		Maret	Juni	September	Desember
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.008.938	5.618.750	24.756.250	49.208.925	145.007.925
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	103.250.000	5.618.750	22.100.050	36.049.925	91.249.925
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.240.000	-	2.656.200	7.900.000	12.240.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.518.938	-	-	5.259.000	41.518.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.131.547.398	1.007.942.152	2.776.228.154	4.265.044.521	5.957.934.582
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.083.847.647	1.007.942.152	2.767.153.154	4.247.276.646	5.917.100.144
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.500.000	-	-	6.460.000	12.160.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.999.938	-	-	-	5.399.938
Koordinasi dan Penyusunan	14.999.813	-	5.550.000	6.489.125	14.078.250

Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD					
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12.200.000	-	3.525.000	4.818.750	9.196.250
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	4.827.500	8.952.500	8.952.500	46.666.500
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	4.827.500	8.952.500	8.952.500	46.666.500
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	464.509.458	-	1.820.000	297.872.250	448.074.145
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	23.156.250	-	-	3.843.750	20.200.750
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	317.060.000	-	-	276.123.500	315.848.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	124.293.208	-	1.820.000	17.905.000	112.025.395
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.032.925.251	168.056.350	428.244.550	678.283.477	1.031.282.327
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	19.999.000	-		19.999.000	19.999.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	750.330.500	163.121.350	378.158.200	560.651.300	750.330.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.000.000	-	10.951.100	17.214.800	33.999.800
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.495.938	-	9.120.000	33.155.000	59.333.500
Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.100.000	4.935.000	9.870.000	19.740.000	43.060.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.000.000	-	11.876.900	19.255.027	104.560.827
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19.999.813	-	8.268.350	8.268.350	19.998.700
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	672.377.250	-	-	336.564.000	620.376.500

Daerah					
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	525.571.000	-	-	277.400.000	499.400.000
Pengadaan Mebel	0	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146.806.250	-	-	59.164.000	120.976.500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.779.258.105	682.334.985	1.836.258.565	3.006.250.424	4.704.926.519
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	6.250.000	6.250.000	10.000.000	10.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	163.602.355	15.965.789	50.401.325	89.897.958	153.495.747
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	-	-	14.200.000	29.820.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.575.655.750	660.119.196	1.779.607.240	2.892.152.466	4.511.610.772
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.000.000	-	32.209.700	63.189.700	222.472.400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	-	1.444.700	1.444.700	14.162.900
Pemeliharaan Mebel	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	-	8.540.000	19.520.000	19.520.000
Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	185.000.000	-	22.225.000	32.225.000	178.789.500
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.437.424.563	-	193.530.313	415.827.188	1.390.606.938
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	651.410.000	-	174.635.000	250.977.500	651.410.000
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan	44.312.188	-	5.395.313	17.183.888	43.023.088

Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	35.261.850	-	13.500.000	13.500.000	30.511.850
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	528.053.025	-	-	134.165.800	517.851.000
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	0	-	-	-	-
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	-	-	-	-
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	178.387.500	-	-	-	147.811.000
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	666.165.813	-	12.299.438	20.243.538	666.004.888
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	110.608.500	-	-	-	110.608.500
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	106.847.500	-	9.071.250	13.571.250	106.847.500
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	448.709.813	-	3.228.188	6.672.288	448.548.888
Pembinaan Penyidik Pegawai	23.211.000	-	-	-	19.970.200

Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota					
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	23.211.000	-	-	-	19.970.200
TOTAL	15.649.427.776	1.868.779.737	5.314.299.470	9.141.436.523	15.253.322.924
PERSENTASE		12,02%	34,67%	59,63%	97,47%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi capaian pada tahun 2021 adalah sebesar **97,47%** dengan rincian serapan pada Triwulan I **12,02%**, Triwulan II **34,67%** dan Triwulan III **59,63%** sehingga pada Triwulan IV jumlah serapan anggaran adalah **97,47%** atau **Rp. 15.253.322.924,-**.

Tabel 3.11. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

No	Kegiatan	Pagu	Fisik	Realisasi Keuangan	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Belanja SKPD	15.649.427.776	100%	15.253.322.924	97,47 %
2	Belanja Tidak Langsung	6.301.287.647	100%	6.133.180.144	97,33 %
3	Belanja Langsung	9.348.140.129	100%	9.120.142.780	97,56 %

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021, penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) hanya bisa tercapai dengan cara memberikan hasil laporan kinerja instansi pemerintah yang baik pula.

Diharapkan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 ini dapat meningkatkan kelancaran, ketepatan dan keakuratan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang semakin produktif, profesional, efektif dan efisien.

Selama pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah urusan wajib pelayanan dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2021 terdapat hal-hal yang bisa dijadikan perhatian yaitu kesiapsiagaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya berperan aktif dalam penanggulangan penanganan pandemi COVID-19, penanganan laporan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan Perkada serta pengawasan pemantauan terkait perijinan yang masih belum dipenuhi oleh pelaku usaha di Wilayah Kota Palangka Raya. Hal ini bisa menjadi pertimbangan kedepannya untuk meningkatkan capaian indikator kinerja terkait penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan 1 (satu) urusan, 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan;
2. Realisasi seluruh anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya pada tahun 2021 sebesar **Rp. 15.253.322.924,-** atau **97.47%** dari total pagu anggaran **Rp. 15.649.427.776,-**; dan
3. Secara umum capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2021 dinilai berhasil dalam memenuhi target yang ditetapkan pada Rencana Strategis tahun 2018-2023 yaitu 550 atau 100%, walaupun masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pencapaian yang dihadapi.

1.1. Permasalahan dan kendala

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana minimal sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk kegiatan di lapangan;
- b. Masih terdapat target indikator yang sulit dicapai dikarenakan masih kurangnya Sumber Daya Manusia;
- c. Masih perlu ditingkatkannya kemampuan teknis dan manajerial/administratif SDM anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya;

- d. Perlu adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan instansi teknis terkait penyelenggaraan trantibumlinmas dan untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- f. Kurang adanya kemauan masyarakat dalam penyelesaian tertib administrasi perijinan, dimana hal ini dapat menunjang peningkatan PAD.

1.2. Solusi, Usul dan Saran

- a. Perlu adanya penambahan kendaraan dinas operasional sebagai penunjang kegiatan dilapangan disebabkan bertambahnya beban kerja dan permasalahan di lapangan serta alat pengaman diri individu/perorangan, regu, Patroli dan perlengkapan penegakan Perda dan Perkada yang masih minim atau belum tersedia;
- b. Perlu adanya penambahan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian target indikator kinerja;
- c. Perlu ditambahkan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya yang proporsional dan profesional;
- d. Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan melalui Diksar maupun Diklat Lanjutan; dan
- e. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dan kerjasama dengan instansi terkait sehingga potensi peningkatan PAD dapat diberdayakan secara maksimal.

Demikian yang dapat kami laporkan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

YOHN B. G. PANGARIBUAN, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19751219 199402 1 001